

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta,: PT. Fajar Grafindo Persada.

A'an Efendy dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

A.P. Parlindungan (I), 1999, Pendaftaran Tanah Di Indonesia Berdasarkan PP 24 Tahun 1997 Dilengkapi Dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP 37 Tahun 1997), Madar Maju, Bandung

-----1994, Bunga Rampai Hukum Agraria serta Landreform, Bagian II, Mandar Maju, Bandung

Bambang Marhijanto, 1999, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Terbit Terang, Surabaya

Burhan Ashshof, Metodologi Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Cetakan Kesembilan, Djambatan, Jakarta

Bernhard Limbong, Hukum Agraria Nasional, Magretha Pustaka, Jakarta, 2012,

C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, 2001, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dan Peraturan Pelaksananya, Sinar Grafika, Jakarta.

Dedi Sugiono, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Jakarta

Habib Adjie, (I), 2009, Menopang Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT), Citra Aditya Bakti, Bandung

_____, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditya Bakti, Bandung

Indoharto dan Ridwan HR, Hukum Administarasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Khairulnas dan Leny Agustan, 2018, Panduan Notaris/ PPAT Dalam menghadapi Gugatan Perdata, UII Pers, Yogyakarta

Lexy J. Molears, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013

Marwan Effendy, 2017, Teori Hukum daro Pespektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana, Referensi, Jakarta

Miftah Thoha, 202, Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, Raja Grafindo

Persada, Jakarta

Philipus M. Hardjon, Makalah Tentang Wewenang, Universitas Air Langga, Surabaya, 1986

Urip Santoso (I), 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

-----, 2016, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta, Prenada Media Group, Jakarta

W. Riakan Tjandra, 2010, Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta

Wahid Muchtar, 2008, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Jakarta, Republika.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Peraturan Pemerintah. Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah. Nomor. 37 Tahun 1998 Tentang Jabatan PPAT;

Peraturan Presiden Nomor. 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang;

Peraturan Presiden Nomor. 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

JURNAL

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1060/5/13840001_file5.pdf, diakses pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul: 19.40 WIB

<http://probopribadisembiringmeliala.blogspot.com/2013/10/jurnal-hukum-peran-pejabat-pembuat-akta.html>, diakses pada tanggal 3 November 2020, pukul 21.30 WIB

